

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang secara serius mengganggu fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang menyebabkan kerugian manusia, materi, ekonomi dan lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Filiz Tas, (2019) menjelaskan bencana adalah peristiwa yang mengganggu tatanan masyarakat, yang menyebabkan kerugian ekonomi, sosial maupun nyawa dan juga dapat mengganggu aktifitas sehari-hari, yang berdampak dalam kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi seperti letusan gunung api, banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung (Krishna, 2018).

Berdasarkan data dari BNPB tahun 2020, kejadian bencana di Indonesia meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 1.986 kejadian bencana dan pada tahun 2020 terdapat 2.925 kejadian. Laporan dari EM-DAT (*international disaster database*) pada tahun 2018 kejadian bencana alam di seluruh dunia mengakibatkan kematian sebanyak 11.804 jiwa, dan data dari WHO tahun 2018 mengatakan lebih dari 68 juta orang di seluruh dunia terdampak bencana. Sedangkan menurut DIBI (Data Informasi Bencana Indonesia) dalam kurun waktu Januari hingga Agustus

tahun 2021 tercatat 1.805 kejadian bencana di Indonesia yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 508 jiwa, 69 orang hilang, sebanyak 12.881 orang mengalami luka luka dan korban yang terpaksa harus mengungsi lebih dari 5,8 juta orang (BNPB, 2021).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi 5 provinsi tertinggi kejadian bencana. Kondisi ini disebabkan karena geografis Sumatera Barat yang berada pada jalur patahan semangko, tepat diantara pertemuan dua lempeng benua besar yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang mengakibatkan rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Kota Padang merupakan Ibu kota provinsi Sumatera Barat yang terletak di area pesisir sehingga kota Padang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi yaitu berupa gempa bumi, tsunami, badai atau angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim, abrasi pantai, tanah longsor, dan kebakaran (Sudibyakto, 2018).

Tingkat kerentanan Kota Padang terhadap bencana gempa dan tsunami termasuk kategori tinggi, bahkan Provinsi Sumatera Barat termasuk satu di antara 7 provinsi di Indonesia yang mendapatkan prioritas dalam mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami (Dian O, 2013). Kota Padang sering kali mengalami gempa bumi, dampak dari gempa bumi yang terjadi yaitu sebanyak 774 orang meninggal, 2.462 orang luka-luka, dan 79.016 bangunan rusak, hal ini lebih besar dari pada total kerugian bencana lainnya (Anam et al., 2018). Dengan tingginya potensi kejadian

bencana, maka tingkat kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana pun meningkat, serta minimnya kapasitas masyarakat dalam menangani bencana menyebabkan resiko bencana menjadi lebih tinggi.

Masyarakat sebagai korban terdampak bencana memiliki risiko yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya harta, dan gangguan kegiatan masyarakat risiko tersebut dapat dikurangi ataupun dicegah apabila ketangguhan telah terbentuk dalam diri masyarakat (Kemenkes, 2017). Melihat kenyataan bahwa dampak bencana alam sangat besar bagi kehidupan masyarakat, maka kesiapsiagaan masyarakat harus segera ditingkatkan dan diwujudkan agar masyarakat dapat melakukan antisipasi menghadapi dampak bencana alam (Pudjiastuti, 2019). Menurut UU No. 24 Tahun 2007 kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Implementasi *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* tahun 2015-2030 dilakukan berdasarkan empat prioritas aksi yaitu: memahami risiko bencana, memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana, berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang lebih efektif (Berkala et al., 2019). Sehingga diperlukan mitigasi bencana dalam mengurangi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana. Dalam kehidupan sehari-hari kecelakaan juga sering terjadi dan dapat menimpa siapa saja, pada umumnya kecelakaan terjadi tanpa diduga dan akibat yang

ditimbulkannya bervariasi, cedera ringan, sedang, berat, bahkan sampai meninggal dunia (Wulandari et al., 2018). Pemberian bantuan awal akan sangat bermanfaat jika dilakukan dengan sebaik mungkin, lebih baik ditolong meskipun tidak sempurna daripada dibiarkan tanpa pertolongan.

Kegawatdaruratan merupakan kejadian yang tak terduga dan dapat terjadi secara tiba-tiba yang memerlukan penanganan segera. Salah satu kondisi kegawatdaruratan yang dapat mengancam jiwa dan memerlukan penanganan segera adalah henti jantung atau *cardiac arrest*. Henti jantung atau *cardiac arrest* adalah keadaan dimana terjadinya penghentian mendadak sirkulasi normal darah karena kegagalan jantung berkontraksi secara efektif selama fase sistolik (Hardisman, 2014). Penatalaksanaan henti jantung dengan menggunakan prinsip IHCA dimulai dari pengenalan awal dan pencegahan, segera mengaktifkan *emergency response* atau sistem tanggap darurat, pemberian RJP berkualitas, melakukan defibrilasi, jika pasien sudah kembali normal diberikan perawatan pasca henti jantung dan pemulihan (AHA, 2020). Resusitasi (*resuscitation*) yang berarti “menghidupkan kembali” merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah timbulnya episode henti jantung yang berakibat fatal atau kematian.

Jika penanganan tidak segera dilaksanakan pasien dengan kondisi henti jantung dapat mengalami kematian dalam waktu yang sangat singkat sekitar 4-6 menit (Andrianto, 2020). Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap bencana, kemudian

menumbuhkan sikap cepat tanggap akan bencana (Bahtiar, 2021). Pengetahuan bantuan hidup dasar (BHD) adalah sebuah pengetahuan dan keterampilan, karena jika hanya mengetahui teorinya saja, tanpa melakukan latihan atau praktek, maka keinginan untuk menolong kurang dan mental tidak terlatih ketika benar-benar menghadapi kejadian sebenarnya (Dahlan et al., 2019). Rendahnya pengetahuan dapat berdampak terhadap munculnya sikap dan perilaku prososial terhadap orang disekitarnya. Dengan pengetahuan bantuan hidup dasar dapat membentuk keinginan dalam menolong saat terjadinya kegawatdaruratan saat bencana (Syaiful, 2019). Masyarakat merupakan korban sekaligus ujung tombak penanggap pertama situasi krisis kesehatan atau bencana di Indonesia yang mengancam jiwa atau kesehatan mereka.

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan kesiapsiagaannya baik dari segi individu ataupun rumah tangga. Salah satu tindakan promotif dan preventif yang bisa dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif lintas sectoral adalah mempersiapkan kader kampung siaga bencana (K2SB). Sebagai bagian dari masyarakat, kader kampung siaga bencana (K2SB) menjadi garda terdepan dalam kejadian bencana (Kemenkes RI, 2015). Kader kampung siaga bencana (K2SB) adalah masyarakat yang berfungsi untuk mencegah gawat darurat dan bencana meliputi kesiagaan masyarakat, pencegahan dan mitigasi atau penjinakan kejadian gawat darurat dan bencana, serta berfungsi juga untuk reaksi cepat penanganannya di bidang kesehatan (Welly, 2021). Menurut UU No.

128 (2011) salah satu syarat K2SB adalah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sejenis yang dilakukan oleh dinas atau instansi sosial kabupaten/kota, provinsi, atau Kementerian Sosial.

Dengan kesiapsiagaan yang tepat berupa pelatihan kader dalam pemberian bantuan hidup dasar diharapkan upaya penanggulangan dapat lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan (Trinurhilawati, 2019). Sebab, ditangan mereka terletak keberhasilan pengembangan dan pembinaan peran serta masyarakat sangat penting agar terciptanya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menghadapi kondisi kegawatdaruratan seperti saat terjadinya bencana alam menuntut individu atau kelompok yang menemukan korban untuk memberikan pertolongan segera. Akan tetapi, jika penolong tidak mengetahui cara yang baik dan benar dalam memberikan bantuan hidup dasar maka bisa berakibat fatal pada korban.

Penanganan korban di tempat kejadian menjadi hal yang sangat penting saat bencana. Bantuan hidup dasar merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi organ vital pada korban henti jantung dan henti napas dengan memberikan kompresi dada atau resusitasi jantung paru dan pemberian napas bantuan (Hardisman, 2014). Pengetahuan dan keterampilan bantuan hidup dasar sangat penting, karena didalamnya diajarkan bagaimana teknik dasar penyelamatan korban dari berbagai kecelakaan ataupun musibah sehari-hari yang bisa dijumpai (Fajarwati, 2012). Dengan kesiapsiagaan yang

tepat berupa pelatihan kader dalam pemberian bantuan hidup dasar diharapkan upaya penanggulangan risiko dapat lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir jumlah korban saat kejadian bencana (Trinurhilawati, 2019).

Pembekalan pengetahuan mengenai mitigasi bencana sangatlah penting bagi kader kampung siaga bencana (K2SB) yang berada di masyarakat. Karena belum adanya kader siaga bencana di RW 04 Kelurahan pasie nan tigo yang bergerak khusus dalam bencana maka perlunya dibentuk kader bencana dalam mengurangi resiko bencana. Partisipasi mahasiswa dalam upaya pengurangan resiko bencana dapat diwujudkan dengan Pendidikan Kebencanaan seperti yang dilaksanakan oleh mahasiswa Profesi Ners Fakultas Keperawatan Unifersitas Andalas yang telah melaksanakan praktik Mata kuliah Keperawatan Bencana di Kelurahan Pasie Nan Tigo, dari tanggal 28 November 2021 sampai dengan 01 Januari 2022.

Wilayah RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo yang berada di Kecamatan Koto Tengah menjadi salah satu zona merah gempa bumi dan tsunami hal ini dikarenakan di sebelah baratnya wilayah ini berbatasan langsung dengan pantai panjang (Samudera Indonesia). Data dari Kementrian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa mengatakan bahwa 2.520 Hektar desa atau Kelurahan Pasie Nan Tigo merupakan lahan rawan banjir, gelombang pasang, tsunami dan jalur gempa.

Setelah dilakukan musyawarah masyarakat kelurahan I (MMK I) di Rumah ketua RT 02 RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo pada tanggal 9 Desember 2021, didapatkan hasil bahwa masyarakat sepakat untuk membentuk sebuah Kader kampung siaga bencana (K2SB). Kader kampung siaga bencana (K2SB) yang dibentuk meliputi kader ibu hamil dan anak, kader lansia, kader remaja dan dewasa. Kader ini telah dibentuk dengan beranggotakan 10 orang kader siaga bencana dan disusun pada tanggal 13 Desember 2021, yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti tgl 14 Desember 2021, 4 orang dari 10 orang kader kampung siaga bencana yang diwawancarai mengatakan tidak tahu apa itu BHD dan mengatakan belum pernah mendapatkan atau mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar. Sebagai kelompok pertama yang menerima pelatihan, para kader yang tergabung dalam K2SB nantinya diharapkan pertama sekali mampu memiliki kesiapsiagaan yang baik terlebih dahulu secara pribadi kemudian akan *menjadi role model* dan perpanjangan tangan Kader kampung siaga bencana Kelurahan Pasie Nan Tigo yang mana diharapkan semua penyuluhan dan pelatihan yang diadakan dan diberikan oleh mahasiswa dapat dipahami, dilaksanakan oleh kader pribadi di keluarga sebelum kemudian diteruskan ke masyarakat luas. Selain itu, nantinya K2SB ini juga diharapkan akan menjadi garda terdepan di RW 04 dalam membantu



K2SB sebagai tim tanggap darurat bencana jika terjadi bencana di Kelurahan Pasie Nan Tigo khususnya RW 04.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ Pengaruh Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Terhadap Tingkat Pengetahuan Kader kampung siaga bencana (K2SB) di RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah “Bagaimana Pengaruh Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Terhadap Tingkat Pengetahuan Kader kampung siaga bencana (K2SB) di RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum penulisan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) terhadap tingkat pengetahuan kader kampung siaga bencana (K2SB) terhadap di RW 04 Kelurahan Pasie Nan Tigo.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Diketahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan terhadap bantuan hidup dasar sebelum dilakukan pelatihan bantuan hidup dasar pada kader siaga bencana di RW 04 kelurahan Pasie Nan

Tigo.

b. Diketahui distribusi frekuensi tingkat pengetahuan terhadap bantuan hidup dasar setelah dilakukan pelatihan bantuan hidup dasar pada kader siaga bencana di RW 04 kelurahan Pasie Nan Tigo

c. Diketahui pengaruh pelatihan bantuan hidup dasar terhadap tingkat pengetahuan kader siaga bencana di RW 04 kelurahan Pasie Nan Tigo

